



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FUTURES  KONTRAK
BERJANGKA
MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

Subsidi SRG Rp 50 M ■

**PLKA Sarana Pemasaran
Ekonomi Kreatif** ■

**PLKA
'Safety Belt'**

**Perdagangan
Dalam Negeri**



Di awal tahun 2009, ini, kabar baik mengalir dari pasar lelang komoditi agro (PLKA). Inilah kali pertama pasar lelang berdiri sejak keran izin pendirian PLKA ditutup Bappebti pada tahun 2006. Pada 16 Februari 2009, PLKA kembali berdiri Di Yogyakarta. Dengan hadirnya PLKA DIY, menambah daftar panjang pasar lelang di daerah menjadi 20 dari 19 provinsi.



Berdirinya PLKA DIY merupakan inisiatif pemerintah daerah yang datang dari kebutuhan para pelaku pasar. Adalah Bank Pembangunan Daerah DIY yang menjadi motor penggerak pasar lelang di kota gudeg ini. BPD DIY mencoba menggali potensi pengembangan pasar keuangan melalui pengembangan pasar lelang komoditi yang terorganisir.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, yang menghadiri dan meresmikan PLKA DIY, merespon positif atas inisiatif daerah mendirikan PLKA di tengah gempuran krisis keuangan global. Dikatakannya, PLKA menjadi sarana penting dalam peningkatan daya saing komoditi lokal. Dengan adanya peningkatan kualitas komoditi lokal, maka pemenuhan kebutuhan konsumsi domestik dapat terpenuhi. Sehingga barang impor dapat ditekan.

Kabar baik lain yang datang dari pasar lelang, Bappebti telah mengkaji dan merencanakan pengelolaan PLKA secara

professional. Dalam arti, pasar lelang dapat dikelola oleh pihak swasta. Sehingga, beban pemerintah dalam mengembangkan pasar lelang yang bergantung dari dana APBN atau APBD dapat berkurang. Paling tidak, dana itu bisa dialokasikan untuk pengembangan pasar lelang yang lebih kondusif. Atau pun, bisa digunakan untuk pengembangan di daerah baru.

Kabar baik juga datang dari instrument pembiayaan sistem resi gudang. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar, untuk membantu petani dari beban bunga bank. Subsidi bunga bank akan diberikan sebesar 50 persen manakala petani pemilik dokumen resi gudang mengajukan kredit pembiayaan pada bank.

Uniknya, mengucurnya dana subsidi ini merupakan inisiatif pihak legislative. Saat pembahasan anggaran tahun 2009, Komisi VI DPR RI mengajukan dana subsidi SRG kepada pemerintah. Inilah salah satu bentuk dukungan dalam pengembangan SRG di tanah air. Dan, bentuk dukungan lain pun masih diharapkan mengalir ke SRG. Sehingga instrument pembiayaan ini dapat berjalan dan menjadi sahabat petani dalam meningkatkan kinerjanya.

Ah..., alangkah senangnya demikian banyak kabar baik di awal tahun 2009, ini. Semoga bermanfaat bagi rakyat dan anda pembaca setia Buletin Berjangka. Salam!

3 LAPORAN UTAMA

Mari Elka Pangestu:
PLKA Safety Belt
Perdagangan
Dalam Negeri



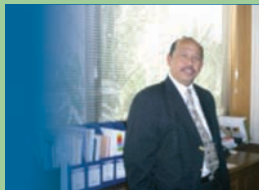
12 RESI GUDANG

Subsidi SRG
Rp 50 Miliar



28 KIPRAH

Edi Susmadi:
Jajal Bisnis
Perdagangan Berjangka



Fokus 6-7
 Saatnya Swastanisasi PLKA

Market 8
 Harga Minyak Melemah

Analisa 9
 Harga Emas Kian Panas

Aktualita 10-11
 BAKTI Tunjuk B.M Kuntjoro Jakti
 sebagai Arbiter Senior

Agenda Foto 14-15

Komoditi 16-18
 Cabai Sipedas dari Amerika

Outlook 19-20
 Financial Darwinists Must Applaud Debt-Cost Jump

Transaksi 21
 Rekapitulasi Transaksi Pasar lelang Forward Agro

Berjangka 22-23
 Wacana Bursa Tandingan Bikin BBJ 'Melek'

Peraturan 24-25
 Penugasan Direktur Kepatuhan

Wawasan 26-27
 PLK Sarana Pemasaran Ekonomi Kreatif



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Penasehat/Penanggung Jawab:** Deddy Saleh
Pemimpin Redaksi: Chrisnawan Triwahyuardhianto **Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Natalius Nainggolan
Dewan Redaksi: Yusuf Affandi, Lili Yuliana S, Dian Sandita Arisanti, Suhendro, Ambre Satria P, Sri Sundayani, Poppy Juliyanti
Sirkulasi: Sapin Siswantonoro, Katimin **Alamat Redaksi:** Bumi Daya Plaza Lt. 4 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat
 Kotak Pos 1444. Telp (021) 3156315 (hunting), Fax. (021) 3156135. www.bappebti.go.i

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: berbakti@bappebti.go.id



Mari Elka Pangestu: PLKA Safety Belt Perdagangan Dalam Negeri

Tantangan pemerintah ditengah krisis keuangan global demikian berat. Namun, sektor perdagangan masih memiliki prospek ditahun 2009. Oleh sebab itu, agar perekonomian global tidak telalu menekan para petani dan para pengusaha UKM, Departemen Perdagangan berkepentingan menjaga momentum peningkatan daya saing dan promosi ekspor, perbaikan iklim investasi yang akan lebih dipermudah, mengamankan pasar dalam negeri dan menstimulus pasar untuk meningkatkan volume perdagangan. Serta, meningkatkan konsumsi pasar domestik sebagai safety belt- sabuk pengaman perdagangan dalam negeri.

Pemda DI Yogyakarta di awal tahun 2009 ini bolehlah berbangga hati. Karena di daerah salah satu tujuan wisata mancanegara dan domestik, ini, telah berdiri pasar lelang komoditi agro (PLKA). Persis dua tahun lamanya, sejak tahun 2007, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) tak lagi merekomendasi berdirinya pasar lelang di daerah. Dengan hadirnya PLKA DIY, ini, jumlah pasar lelang yang dibina Bappebti genap 20 dari 18 provinsi.

Kebanggaan dari para pelaku pasar lelang DIY ini, tidak saja sampai di situ. Pasaunya, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, hadir dalam persemian penyelenggaraan tersebut, yang dilaksanakan pada 16 Februari 2009. Dan di sesi pertama perdagangan pasar lelang, Mari Pangestu didapuk sebagai juru lelang dan dibantu Sugeng Wardoyo, Juru Lelang Soropadan, Jateng.

Terlaksananya penyelenggaraan PLKA DIY itu, adalah inisiatif pemerintah daerah yang dimotori Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, dan bekerjasama dengan Bank Pembangunan-BPD DIY. Dengan kerjasama tersebut, penyelenggaraan PLKA DIY dilaksanakan di Jl. Tentara Pelajar, No.7, Yogyakarta. Atau tepatnya di gedung milik BPD DIY.

Hadir dalam penyelenggaraan PLKA DIY itu antara lain, Kepala Bappebti, Deddy Saleh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov. DIY, Suhartuti Sutopo, Kepala Disperindagkop dan UKM DIY, Koesdarto Pramono, dan Dirut BPD DIY, Supriyanto. Pada kesempatan itu, juga dihadiri Ketua Komisi VI DPR-RI, Totok Daryanto.

Merintis berdirinya PLKA DIY telah dilakukan sejak tahun 2007, dengan prakarsa BPD DIY. Sejak dirintis, telah pula dilakukan percobaan pasar lelang baik dilaksanakan di gedung BPD DIY maupun di Kantor Cabang BPD DIY, Wonosari dan Wates.

Optimis

Menteri Perdagangan Mari Elka Pan-

▶ Laporan UTAMA ◀

gestu, dalam sambutannya, mengatakan, "penyelenggaraan pasar lelang Yogyakarta ini dilaksanakan pada waktu yang tepat, guna mendukung pemenuhan dan peningkatan konsumsi lokal. Agar perekonomian global tidak telalu menekan para petani dan para pengusaha UKM kita."

"Pengembangan pasar lelang ini bertujuan mempersingkat mata rantai perdagangan dengan mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka," jelas Mari Pangestu.

Lebih jauh dikatakannya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa target kebijakan ekonomi pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan.

"Menghadapi kondisi keuangan dan ekonomi global saat ini, tantangan pemerintah tentu semakin berat. Namun, pemerintah tetap optimis terutama terhadap prospek sektor perdagangan pada tahun 2009 ini. Oleh sebab itu, kebijakan yang akan ditempuh Departemen Perdagangan, antara lain tetap menjaga momentum peningkatan daya saing dan promosi ekspor, perbaikan iklim investasi yang akan lebih dipermudah, mengamankan pasar dalam negeri dan menstimulus pasar untuk meningkatkan volume perdagangan, dan meningkatkan konsumsi pasar domestik sebagai *safety belt*- sabuk pengaman perdagangan dalam negeri," kata Mari Pangestu.

Lebih lanjut dikatakan, Indonesia menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan berdampak pada usaha peningkatan ekspor masing-masing negara tidak terkecuali Indonesia. Sebagai negara yang berpenduduk terbesar ke-4 dunia, Indonesia justru mendapat dampak positif dari kondisi dunia ini, untuk memenuhi



kebutuhan pokoknya sendiri. "Indonesia harus lebih siap menghadapi krisis global dengan mengandalkan pasar domestik."

Barang impor dari negara lain yang beredar akan berkurang karena negara importir juga akan mengurangi produksinya akibat skala ekonomi usaha yang menurun sehingga produk impor tersebut bisa tergantikan dengan produk lokal dan menumbuhkan usaha serta ekonomi kreatif usaha kecil menengah.

"Berkenaan dengan itu, penyelenggaraan pasar lelang komoditi Yogyakarta ini dilaksanakan pada waktu yang tepat guna mendukung pemenuhan dan peningkatan konsumsi lokal. Agar perekonomian global tidak telalu menekan para petani dan para pengusaha UKM kita," imbuhnya.

Kehadiran pasar lelang juga diharapkan dapat memperpendek mata rantai, pemasaran, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan

usaha dan terjaminnya penyerahan komoditi sesuai dengan kebutuhan, tambah Mari. Selain itu, terbentuknya harga di pasar lelang dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapat dijadikan sebagai harga acuan bagi pelaku pasar dan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis komoditi.

"Untuk itu saya sangat bangga dengan telah berdirinya pasar lelang Yogyakarta yang dapat menjadi tempat pemasaran produk unggulan DIY dan sekitarnya. Diharapkan penyelenggaraan lelang ini dapat berkesinambungan dan dapat memberikan pelayanan terpadu yang bermanfaat bagi dunia usaha di Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Jawa Tengah," papar Mari Pangestu.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov. DIY,

Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu

"Penyelenggaraan pasar lelang Yogyakarta ini dilaksanakan pada waktu yang tepat, guna mendukung pemenuhan dan peningkatan konsumsi lokal. Agar perekonomian global tidak telalu menekan para petani dan para pengusaha UKM kita."

"...,meningkatkan konsumsi pasar domestik sebagai *safety belt*- sabuk

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X

"...,kami optimis pasar lelang Yogyakarta mampu meningkatkan posisi tawar petani. Dan menjadi salah satu sub-sektor penggerak pertumbuhan perekonomian Yogyakarta."

Dirut BPD DIY, Supriyanto

"...,para peserta pasar lelang dapat

difasilitasi BPD DIY, baik dalam bentuk permodalan maupun pembiayaan."

Kepala Bappebti, Dedy Saleh

"Beberapa pasar lelang masih menghadapi kendala yang perlu dicarikan solusinya. Antara lain, masih kurang optimalnya dukungan pendanaan dari perbankan sehingga sering terjadi gagal serah dari transaksi yang disepakati."

PLKA DIY Ditutup Rp 45 Miliar

Suhartuti Sutopo, mengatakan, pemerintah daerah mendukung dan mengharapkan pasar lelang ini bisa menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Berdasarkan data transaksi dari percobaan penyelenggaraan pasar lelang yang telah dilaksanakan beberapa kali, kami optimis pasar lelang Yogyakarta mampu meningkatkan posisi tawar petani. Dan menjadi salah satu sub-sektor penggerak pertumbuhan perekonomian Yogyakarta."

Sedana dengan itu, Dirut BPD DIY, Supriyanto, mengatakan, pelaksanaan pasar lelang Yogyakarta yang diprakarsai BPD DIY, merupakan upaya menggerakkan sektor pertanian dan perdagangan.

"Dengan demikian para peserta pasar lelang dapat difasilitasi BPD DIY, baik dalam bentuk permodalan maupun pembiayaan," kata Supriyanto.

Pasar Modern

Dengan berdirinya PLKA DIY, jumlah pasar lelang menjadi 20 dari 18 provinsi. Dari sekian banyak pasar lelang itu, dalam pelaksanaannya masih menemui banyak kendala. Bappebti sebagai badan yang membina pasar lelang telah berupaya mencari solusi dalam peningkatan kualitas transaksi.

"Beberapa pasar lelang masih menghadapi kendala yang perlu dicarikan solusinya. Antara lain, masih kurang optimalnya dukungan pendanaan dari perbankan sehingga sering terjadi gagal serah dari transaksi yang disepakati," ungkap Kepala Bappebti, Deddy Saleh.

"Untuk itu, kami menghargai upaya dari BPD DI Yogyakarta untuk berperan serta aktif mendukung pelaksanaan penjaminan dan pembiayaan kredit pada pasar lelang Yogyakarta ini, tambahnya.

Harapan Bappebti, kelak akan terwujudnya model pasar lelang modern dengan penyelenggaraannya yang profesional dan mandiri. Dengan memperdagangkan produk unggulan setempat dan menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli kelas dunia. "Kami berkeinginan di masa mendatang penyelenggaraan pasar lelang di Indonesia dilakukan dengan cara *"remote trading"*. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga para peserta pasar lelang dapat berperan serta dengan mudah, efisien dan cepat dari daerah masing-masing," kata Deddy. ▲

MENTERI Perdagangan Mari Elka Pangestu, yang didapuk jadi juru lelang kehormatan pada sesi pertama perdagangan pasar lelang DIY, berhasil mempertemukan transaksi antara penjual dan pembeli sapi potong. Setelah saling tawar menawar, dikontrak disepakati harga sapi potong sebesar Rp 22.500 perkilogram.

Sementara itu, total nilai transaksi PLKA DIY yang diselenggarakan pada 16 Februari 2009, ditutup sebesar Rp 45 miliar.

Total nilai transaksi PLKA DIY ini lebih rendah dibandingkan dengan penyelenggaraan percobaan pasar lelang yang dilakukan pada 13 Desember 2008. Pada penyelenggaraan pasar lelang yang dilakukan di Kantor Cabang BPD DIY, Wates, itu, mencapai Rp 108,9 miliar.

Sedangkan pasar lelang yang dilakukan di tempat yang sama pada tanggal 4 Desember 2008, mencapai 43,963 miliar. Sementara itu, percobaan pasar lelang yang pertama kali dilakukan pada 1 Desember 2007, nilai transaksi mencapai Rp 13,158 juta. Dan dalam percobaan kedua, 17 Desember 2007, nilai transaksi sedikit menurun sebesar Rp 7,321 juta.

Turun

Sementara itu, pelaksanaan pasar lelang di 19 daerah pada tahun 2008 diselenggarakan sebanyak 110 kali. Dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,63 triliun. Lima daerah yang mencatatkan nilai transaksi terbesar selama tahun 2008, yakni Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 448 miliar, Jawa Timur Rp 436 miliar, Bali Rp 259 miliar, Jawa Barat Rp 103 miliar, dan Sulawesi Selatan dengan nilai Rp 79 miliar.

Walaupun hasil penyelenggaraan pasar lelang itu masih cukup baik, jumlah tersebut menurun sebanyak 32 kali frekuensi lelang (22,5%) atau nilai transaksi sebesar Rp 90,7 miliar (5,27%) dibandingkan tahun 2007.

Penurunan total nilai transaksi yang terjadi pada tahun 2008 itu antara lain disebabkan adanya penurunan frekuensi pasar lelang. Di samping itu, komoditas yang ditawarkan mulai terseleksi sesuai dengan kebutuhan pihak pembeli.

Sepanjang tahun 2008, jumlah komoditas sebanyak 115 jenis, menurun dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 130 jenis. Adapun lima teratas komoditas yang banyak di transaksikan adalah sapi, beras, rumput laut, kopi dan kopra.

Bulan Januari 2009, nilai transaksi pasar lelang telah mencapai Rp 125,6 miliar, dengan jumlah penjual sebanyak 155 orang dan pembeli 30 orang. Komoditas-komoditas yang ditransaksikan antara lain beras, cabe, coklat, damar, gabah, garam, gula pasir, jagung, kentang, kubis/kol, kopra, minyak goreng sawit, rumput laut, sapi, dan tomat. ▲

Saatnya Swastanisasi PLKA

Krisis keuangan global yang menghantam jagat raya ini, sejatinya menjadi momentum peningkatan daya saing produk-produk lokal dan menggantikan produk impor. Dalam kaitan itu, pasar lelang komoditi agro (PLKA) menjadi sarana penting sebagai pemasaran komoditi lokal yang efektif dan efisien. Sebab bertujuan PLKA mempersingkat mata rantai perdagangan dengan mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli.

Dalam kesempatan peresmian pasar lelang *forward*- penyerahan kemudian, DI Yogyakarta, pada 16 Februari 2009, lalu, Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, berujar, penyelenggaraan pasar lelang komoditi Yogyakarta ini dilaksanakan pada waktu yang tepat guna mendukung pemenuhan dan peningkatan konsumsi lokal. Agar perekonomian global tidak telalu menekan para petani dan para pengusaha UKM kita.

Kehadiran pasar lelang juga diharapkan dapat memperpendek mata rantai, pemasaran, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha dan terjaminnya penyerahan komoditi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terbentuknya harga di pasar lelang dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapat dijadikan sebagai harga acuan bagi pelaku pasar dan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis komoditi, tambah Mari.

"Untuk itu saya sangat bangga dengan telah berdirinya pasar lelang Yogyakarta yang dapat menjadi tempat pemasaran produk unggulan DIY dan sekitarnya," kata Mari Pangestu.

Pentingnya peran PLKA dalam pergerakan perekonomian daerah, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai merintis pendirian pasar lelang *forward* sejak tahun 2003. Pasar lelang yang pertama didirikan di Provinsi Jawa Barat, tepatnya 17 Desember 2003. Berturut-turut hingga akhir tahun 2006, jumlah pasar lelang telah berdiri di daerah sebanyak 20 dari 18 provinsi. Dan di tahun 2009, PLKA yang paling bontot berdiri di DI Yogyakarta.

Membangun kekuatan ekonomi daerah di tengah tekanan krisis keuangan global.

Professional dan Mandiri

Mengingat pentingnya peran PLKA dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, Bappebti selaku lembaga yang pembina, pengaturan dan penawasan pasar lelang, di tahun 2009 bermaksud mengembangkan pasar lelang modern. Untuk itu, beberapa studi dan observasi telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas perdagangan pasar lelang. Dan berdasarkan studi itu pula, Bappebti siap menelorkan kebijakan pengembangan pasar lelang untuk masa mendatang.

Harapan Bappebti, kelak akan terwujudnya model pasar lelang modern dengan penyelenggaraannya yang profesional dan mandiri. Dengan memperdagangkan komoditi unggulan setempat dan menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Terutamanya pembeli dengan tujuan ekspor.

"Bappebti berkeinginan di masa mendatang penyelenggaraan pasar lelang di Indonesia dilakukan dengan cara *remote*

trading". Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga para peserta pasar lelang dapat berperan serta dengan mudah, efisien dan cepat dari daerah masing-masing," demikian dikatakan Kepala Bappebti Deddy Saleh.

Pengembangan pasar lelang bertujuan untuk mempersingkat mata rantai perdagangan dengan mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Ini akan meningkatkan posisi tawar para petani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pasar lelang akan menciptakan harga yang transparan dan dapat dijadikan acuan dalam mendorong dan meningkatkan daya saing produk lokal. Serta, mewujudkan kepastian dan perluasan pemasaran.

"Dari observasi yang telah dilakukan, pasar lelang di masa mendatang seharusnya bisa dikelola secara mandiri dan komersial oleh pihak swasta. Sehingga tujuannya bisa dicapai dan terukur," jelas Deddy.

Kondisi Riil PLKA

1. Tingginya gagal serah komoditi
2. Penyelenggaraan bergantung dana dari APBN/APBD
3. Belum ada lembaga penjamin
4. Rendahnya keterlibatan perbankan
5. Lemahnya SDM PLKA
6. Belum luasnya informasi pasar lelang
7. Jenis komoditi sangat beragam
8. Standarisasi komoditi rendah

Total Nilai Transaksi PLKA 2005-2008

Tahun	Transaksi (Rp)
2005	1.110.494.230.750
2006	1.798.442.287.075
2007	1.719.798.310.671
2008	1.634.978.257.525

Provinsi Penyelenggara PLKA

1. Sumatera Utara
2. Sumatera Barat
3. Kab. Agam, Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Bengkulu
7. Lampung
8. DKI Jakarta
9. Jawa Barat
10. Jawa Tengah
11. Kab. Baringmasakeb
12. Jawa Timur
13. Bali
14. Nusa Tenggara Barat
15. Kalimantan Timur
16. Kalimantan Barat
17. Sulawesi Utara
18. Sulawesi Tenggara
19. Sulawesi Selatan
20. DI Yogyakarta

Target 2010

Namun lebih jauh dikatakan Deddy Saleh, pelaksanaan pasar lelang hingga saat ini masih banyak menemui kendala. Diantaranya, tingginya tingkat gagal serah dari kontrak yang telah disepakati saat penyelenggaraan pasar lelang.

"Tetapi di beberapa daerah, PLKA dapat berjalan dengan semestinya. Dan dari indikator nilai transaksi yang cukup tinggi, PLKA daerah tersebut bisa dikelola secara professional atau pun komersial," papar Deddy.

Dengan dikelolanya pasar lelang secara professional, kami yakin pasar lelang akan berkontribusi besar bagi perkembangan perekonomian daerah. Sesungguhnya sudah banyak pasar lelang yang dikelola secara professional. Misalnya, pasar lelang ikan yang ada di Muara Angke, Jakarta Utara. Pasar lelang itu dikelola oleh pihak swasta dan hingga saat ini masih berjalan dengan baik, tambah Deddy.

Menurut Deddy, dalam tahap awal swastanisasi PLKA para peserta bisa saja tidak dipungut iuran. Sedangkan sumber pendapatan pihak swasta yang menyelenggarakan pasar lelang, bisa diambil dari dana bantuan pemerintah. Atau pun, pihak swasta tersebut bertindak sebagai penampung komoditi dan mengambil selisih keuntungan saat komoditi tersebut terjual.

Sementara itu, Kepala Bagian Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriyono Edi, mengatakan, pasar lelang yang berpotensi dikelola secara professional dan komersial ada di lima provinsi. Yakni PLKA Jabar, Jateng, Jatim, Bali dan Sulsel.

"Beberapa pihak sudah ada yang mengajukan minat untuk mengelola pasar lelang secara professional. Bahkan, dari Bali ada sebuah yayasan yang sudah mengajukan minatnya," jelas Sutriyono Edi.

Minat pihak swasta yang ingin mengelola PLKA secara professional agaknya masih harus diredam. Sebab saat ini pun Bappebti sedang menyusun peraturan teknis sebagai acuan penyelenggaraan pasar lelang. "Bappebti masih menggodok cara lelang secara professional," kata Sutriyono.

"Kalau tahun 2009 ini peraturan teknis swastanisasi penyelenggaraan pasar lelang itu bisa selesai, kita akan buka kesempatan bagi pihak swasta. Tetapi ditargetkan tahun 2010 sudah ada PLKA yang dikelola secara professional," tegas Sutriyono. ▲

PLKA Menurut Mereka

>> **H.M Kosim HS** adalah salah satu peserta PLKA yang setiap saat setia mengikuti penyelenggaraan pasar lelang. Beliau adalah pedagang beras dari Pasar Induk Cipinang (PIC), Jaktim.

Bagi Kosim, eksistensi PLKA menjadi salah satu pintu masuk untuk mendapatkan suplai beras dari daerah. Meski jumlahnya beras yang masuk dari PLKA *relative* kecil dibandingkan dengan kebutuhan perhari PIC sekitar 2.000 ton.

"Sebenarnya kantong-kantong yang siap mensuplai beras dari daerah ke pasar induk sudah banyak. Bahkan, beras yang datang sendiri dari daerah ke pasar induk setiap hari ada tetapi soal harga dan kualitas belum tentu cocok. Kalau itu yang terjadi, maka pedagang beras dari daerah itu akan merugi," jelasnya.

Dari pada beras di tahan atau dibawa pulang dengan tingkat kerugian yang lebih besar, pedagang pun obral harga. Inilah salah satunya yang merusak harga beras, tambahnya.

"Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian barang dan harga yang baik, pasar lelang adalah tempat yang tepat," jelas Kosim.

Di samping itu menurut Kosim, PLKA bagi petani ataupun pedagang daerah menjadi salah satu sarana pendidikan menjadi pengusaha yang benar. Dan menciptakan akses pasar yang lebih luas.

Ketika ditanyakan apakah sudah saatnya PLKA dikelola secara professional? Kosim, mengatakan, belum saatnya bila kondisi penyelenggara belum dibenahi.

Tetapi menurut Kosim, bila kesempatan pengelolaan pasar lelang dilakukan secara professional ada baiknya diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Komoditi Agro Indonesia

(APKAI) dan kerjasama dengan pemerintah daerah bersangkutan.

APKAI adalah wadah organisasi para peserta pasar lelang, baik penjual maupun pembeli. APKAI didirikan pada awal tahun 2006 yang dikenal dengan Deklarasi Bali. Yang ketika saat itu ada kesamaan pendapat antara peserta lelang dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), untuk penyelenggaraan PLKA. Pengurus daerah APKA telah terbentuk di Jabar, Jateng dan Jatim.

"Saya pikir APKAI lebih tepat untuk menyelenggarakan pasar lelang. Karena para peserta sudah sama-sama tahu kualitas dan perilaku komoditi yang akan diperdagangkan. Tetapi sangat disayangkan, keberadaan APKAI hingga saat ini belum jelas tindak lanjutnya. Karena lemahnya dukungan pemerintah daerah," papar Kosim.

>> **H. Yayah, Penasihat APKA Jabar.**

Menurut Yayah, yang juga salah satu peserta setia pasar lelang ini, penyelenggaraan PLKA sudah saatnya diselenggarakan secara professional. Sebab, PLKA menjadi sarana penting pembinaan pengusaha daerah.

"Namun, penyelenggaraan pasar lelang yang professional itu jangan membebani para peserta dengan berbagai macam pungutan. Karena akan menambah biaya yang mengakibatkan harga jual menjadi tinggi," kata Yayah.

Senada dengan Kosim, Yayah, juga mengatakan, swastanisasi pasar lelang harus melibatkan APKA. Karena akan memudahkan pengorganisasian peserta lelang yang terdiri dari penjual dan pembeli.

"Menurut saya, tahap awal swastanisasi PLKA mengaktifkan kembali APKA di daerah-daerah. Selanjutnya pembenahan peraturan, fasilitas perdagangan dan menerapkan standarisasi mutu," jelas Yayah. ▲

Harga Minyak Melemah

Jika ada pertanyaan, sejauh mana kekuatan harga minyak? Maka silahkan membaca peta kebijakan perekonomian Amerika Serikat. Sebab harga komoditas ini akan berpotensi melesat menjelang akhir semester II/2009, tentu saja jika dana stimulus yang dikucurkan pemerintahan Barak Obama mampu menggerakkan sektor riil dan terjadi pemulihan ekonomi negara Paman Sam tersebut. Selain sektor infrastruktur, sektor strategis yang akan dibiayai dana paket stimulus ini termasuk kepada kebijakan pengembangan energi terbarukan. Apalagi negara ini merupakan konsumen terbesar untuk urusan energi.

Resesi ekonomi memang membuat kondisi pasar minyak menjadi kian lemah. Apalagi belum

terlihat gejala pemulihan ekonomi. Meski negara-negara OPEC sudah mengurangi produksi minyak hingga 4,2 juta barel per hari serta membatasi ekspor, harga minyak juga tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dan dalam kenyataannya memang harga minyak terus menyajikan tren penurunan. Setelah bertengger di level 50 dolar AS per barel, kini hanya mampu bernafas selain di bawah level 40 dolar AS per barel.

Bahkan koreksi harga minyak ini akhirnya juga memicu indeks saham bursa Asia, disamping sikap pesimis terhadap kemampuan stimulus ekonomi AS menghajar krisis global. Dan yang menyedihkan, harga kontrak minyak mentah semakin menyentuh rekor terendahnya



pada periode 6 bulan terakhir setelah pada perdagangan sebelumnya berjuang di level 36 dolar AS per barel. Sementara harga kontrak minyak untuk pengiriman Maret terdongkrak sebesar 0,14 dolar AS menjadi 36,08 per barel di New York Mercantile Exchange. Dan pada perdagangan Rabu di New York harga minyak bergeser tajam ke level 35,94 dolar AS per barel. ▲



Harga Gula Mulai Meroket

Harga gula kini semanis rasanya. Semakin hari, komoditas ini terus menunjukkan eksistensi kenaikan harga. Berdasarkan data Departemen Perdagangan, harga gula kristal putih naik dari Rp 6.649 per kg menjadi Rp 7.268 per kg. Bahkan di Banda Aceh harganya bahkan mencapai Rp 8.500 per kg! Bandingkan harga terendah dari wilayah Denpasar yang hanya Rp

6.300 per kg.

Menurut Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Bulog, Mohammad Ismeth, kenaikan harga gula dipicu kondisi dimana belum terjadi masa giling tebu. Dan diungkapkannya jika pihak pemerintah sedang merancang mekanisme pengendalian harga gula tersebut. Diharapkan harga gula tidak akan terus meroket dan

saat memasuki musim giling juga tidak terpeleket. Se jauh ini Bulog telah menyalurkan sebanyak 260 ribu gula dari PTPN dan RNI.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Thomas Darmawan mengakui jika gula konsumsi dan rafinasi terus mengukir kenaikan harga karena terpicu melonjaknya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Belum lagi kondisi saat ini yang masih sekitar dua bulan lagi baru melakukan panen tebu. Di pasar internasional saja, harga gula rafinasi juga melesat tajam. Dari tahun lalu yang bertengger di level 370 dolar AS per ton menjadi 415 dolar AS per ton. Dan untuk masalah gula lokal, produksi gula juga diprediksi kian melorot akibat peralihan lahan dari penanaman tebu menjadi ke tanaman lain seperti padi. ▲

Harga Emas Bakal Kian Panas

Investasi emas sebagai sarana lindung nilai memang semakin diminati. Apalagi di tengah resesi ekonomi, menguak rencana paket stimulus Amerika Serikat yang rawan inflasi. Diperkirakan, harga emas akan semakin melambung tinggi. Bahkan sampai di atas level 1.000 dolar AS per ounce!

Meski investor masih menanti dampak kebijakan Presiden AS Barrak Obama untuk paket stimulus ekonomi senilai 787 dolar AS, sudah terlihat tanda-tanda kekhawatiran mengenai kemungkinan melemahnya kurs dolar. Wajar jika keputusan terbaik untuk berinvestasi saat ini jatuh ke komoditas emas. Walaupun untuk saat ini meski sempat meroket tajam, harga emas ternyata sempat pula terkoreksi. Seperti di pasar Asia pada pertengahan februari lalu, harga emas justru jatuh akibat menurunnya permintaan investor. Tercatat, emas untuk pengiriman dalam waktu dekat tersungkur sebanyak 0,6 persen atau hanya 936,33 dolar AS dari level 938,35 dolar AS. Sementara pada perdagangan elektronik *after-hours* untuk Divisi Comex di New York Mercantile Exchange, kontrak emas untuk pengiriman April juga turun menjadi 939 dolar AS per ounce atau anjlok sebesar 0,3 persen.

Pergerakan harga emas juga cukup mendebarkan hati. Setelah mampu bertengger di level 950 dolar AS per ounce, bahkan mampu melampaui target bergengsinya di level 970 dolar AS, tiba-tiba harganya melorot lagi. Meski penurunan harga tidak begitu tajam, sehingga dapat dimaklumi banyak pihak meyakini justru akan terjadi kenaikan yang lebih dahsyat lagi. Peluang emas untuk menyeruak ke atas level 1.000 dolar AS per ounce, jelas bukan perkiraan semata. Jika memang kondisi



perekonomian dunia semakin parah, maka bukan tidak mungkin kemilau emas semakin cerah. Karena dianggap menjadi suatu alternatif investasi yang relatif paling aman. Apalagi sudah terlihat gejala dimana sejumlah pialang, investor dan analis sudah mulai merekomendasikan pembelian emas yang membuat kontrak berjangka emas pada pekan kedua lalu terdongkrak sebesar 3,1 persen. Diperkirakan, kondisi ini akan terus menaikkan citra emas sepanjang masalah perekonomian dunia masih tak terarah.

Keyakinan banyak pihak untuk berinvestasi emas, mungkin tidak sekuat kepercayaan banyak pihak akan kemampuan reaksi kebijakan paket stimulus fiskal pemerintah AS. Bahkan mantan Chairperson Federal Reserve, Alan Greenspan menilai kebijakan tersebut malah tidak akan cukup mampu memperbaiki sistem keuangan

dan memulihkan perekonomian. Karena menurutnya, jumlah dana yang disiapkan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Justru dia mengkhawatirkan jika paket stimulus tersebut akan menguap secara perlahan apabila perbaikan sistem keuangan yang dilakukan pemerintah AS mengalami kegagalan.

Meski demikian, sejumlah pihak justru menyatakan optimismenya terhadap stimulus ini. Sebab jika ditelisik dari sisi nilai tukar, paket stimulus ala AS ini diperkirakan mampu "menormalkan" kondisi dolar AS dari penambahan jumlah uang yang beredar. Sehingga juga mampu mengendalikan inflasi. Diharapkan, perekonomian dunia menjadi stabil sehingga roda perekonomian dapat lentur bergerak melalui pemulihan ekonomi yang dilakukan pihak otoritas moneter dan fiskal. ▲

BAKTI Tunjuk B.M Kuntjoro Jakti sebagai Arbiter Senior

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) mengangkat B.M Kuntjoro Jakti, sebagai Arbiter Senior BAKTI. Diangkatnya mantan Menko Perekonomian, ini, untuk mencapai independensi BAKTI dalam penyelesaian sengketa antara investor dengan perusahaan pialang berjangka di luar arena pengadilan.

Ketua BAKTI, Achmad Zen Umar Purba, disela-sela acara pembekalan calon arbiter BAKTI, di Bogor, 17-18 Januari, 2009, mengatakan, para arbiter harus memiliki pengetahuan yang lengkap tentang materi perdagangan berjangka komoditi. Sehingga penyelesaian berbagai kasus di bidang perdagangan berjangka dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Pada acara pembekalan para calon arbiter BAKTI itu, dihadirkan sejumlah pembicara yang berkompeten di bidangnya. Diantaranya, mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, Ketua BANI, Profesor Priyatna Abdurrasyid, Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Made Soekarwo, Kepala Biro Hukum Bappebti, Pater Y. Angwarmasse. Serta dari kalangan pelaku usaha perdagangan berjangka, yakni Dirut Bursa Berjangka Jakarta, Hasan Zein Mahmud, Dirut Kliring Berjangka Indonesia, Surdiyanto Suryodarmodjo, Ketua APBI, I Gde Raka Tantra, IP2BI, Teddy Gunawan.

Acara pembekalan para arbiter itu, dibuka Kepala Bappebti, Deddy Saleh, yang menyampaikan berbagai permasalahan dan harapan atas berdirinya BAKTI.

Bagir Manan dalam paparannya mengatakan, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative disputes resolution*) sangat penting. Mengingat demikian banyaknya

kasus spesifik yang muncul kepermukaan. Dan membutuhkan pihak-pihak yang ahli dibidangnya.

“Dengan semakin banyaknya badan-badan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, diharapkan perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan memuaskan para pihak. Serta beban perkara pengadilan semakin berkurang,” jelas Bagir Manan.

Sementara itu, Deddy Saleh, mengatakan, kondisi perdagangan berjangka komoditi di Indonesia saat ini rentan dengan permasalahan-permasalahan. Sehingga sering terjadi perselisihan antara investor dengan perusahaan pialang. Di antara permasalahan yang terjadi adalah banyaknya perselisihan perdata antara pialang berjangka dan nasabah. Khususnya pada transaksi yang melalui sistem perdagangan alternative.

“Selama ini Bappebti dan BBJ berusaha mendorong pialang berjangka dan nasabah yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut baik melalui musyawarah untuk mufakat maupun melalui mediasi. Namun upaya tersebut tidak memuaskan para pihak, karena tidak terdapatnya keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat diantara para pihak,” ungkap Deddy.

“Jadi di sinilah peran BAKTI dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berselisih. Peran BAKTI adalah independen dari para pendirinya, karena kemungkinan perselisihan perdata juga terjadi antara para bursa dengan lembaga kliring, antara anggota bursa berjangka dan antara anggota lembaga kliring berjangka,” tambah Deddy. ▲

Paramita Grup Gaet KBI Garap Pasar Lelang

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), Surdiyanto Suryodarmodjo, membenarkan jika pihaknya sedang menjajaki peluang kerja sama dengan Grup Paramita sebagai lembaga penjaminan penyelesaian transaksi untuk pasar lelang komoditas di Tangerang. Grup Paramita merupakan pihak pengembang bisnis pengelolaan jaringan pasar induk tradisional yang dikelola secara moderen, seperti Pasar Induk Jaka Baring di Palembang dan Pasar Induk Tanah Tinggi di Tangerang.

Dalam kerja sama dengan Grup Paramita ini, KBI diminta sebagai lembaga

penjaminan untuk menyakinkan para pelaku pasar tentang keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Meski masih dalam proses pembahasan, tetapi dia berharap melalui lembaga penjaminan ini tidak akan ada lagi muncul keraguan dari para pelaku pasar dengan kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar atau gagal serah barang.

Posisi KBI sendiri sebagai lembaga penjaminan sesuai dalam SK Memperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004, tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro. Rencana KBI tersebut juga sudah disampaikan kepada pihak Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai pihak pengawas pelaksanaan pasar lelang fisik komoditas.

Lebih lanjut dijelaskan Surdiyanto, pasar lelang baru ini akan mentransaksikan komoditas beras yang kemudian disusul dengan jagung. Dari munculnya pasar spot yang terorganisasi ini diharapkan harga yang menyeruak dari transaksi harian mampu menjadi harga acuan nasional. Apalagi kesempatan bertransaksi terbuka lebar bagi pelaku pasar yang berada di luar daerah karena sudah memiliki fasilitas transaksi secara *online*.

Tetapi bukan hanya Grup Paramita dan Surdiyanto yang nantinya bekerja sama dalam bidang ini, sebab mereka juga akan menggandeng *standby buyer* dan *standby seller* yang berasal dari korporasi maupun individu. ▲

PN Jakpus Tolak Permohonan Nasabah GFB

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada persidangan 10 Februari 2009, menolak permohonan para nasabah PT. Graha Finesa Berjangka (GBF) dan segala tututannya yang mempraperadilan Bappebti. Keputusan PN Jakpus itu dibacakan Hakim Sugeng Riyono, SH, MH dan didampingi Panitera, Parmin, SH.

Permohonan praperadilan Bappebti yang diajukan mantan nasabah PT. GFB melalui surat permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.01/Pid/Prap/2009/PN.Jkt.Pst. Permohonan para mantan nasabah GBF itu dikuasakan melalui kantor advokat M. Kamal Singadirata

& Rekan.

Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh mantan nasabah GFB itu, menyatakan bahwa Bappebti telah menghentikan penyidikan perkara yang didasarkan tidak dijawabnya surat pemohon No.03/SP/MKS/I/2008 tanggal 17 Januari 2008, dan surat No. 011/SP/MKS/III/2008, serta surat No.01/SP/MKS/I/2009 tanggal 6 Januari 2009. Sedangkan dalil yang digunakan yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga didasarkan dengan hal itu, maka mantan nasabah GFB meminta agar PN Jakpus untuk menyatakan penghentian

penyidikan perkara oleh Bappebti adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Namun di dalam persidangan, Bappebti menyampaikan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan GFB tidak hanya menyangkut perkara di bidang perdagangan berjangka komoditi. Tetapi juga, adanya dugaan tindak pidana lainnya, maka dalam rangka penyidikan Bappebti melakukan koordinasi dengan Kepolisian Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan sampai saat ini penyidikan masih terus berlangsung. Jadi di dasarnya hal itu tidak benar bahwa Bappebti melakukan penghentian penyidikan perkara dan Bappebti menyatakan menolak permohonan nasabah GFB secara seluruhnya. ▲

Tata Niaga “Normalkan” Stok Baja

Setelah dikeluarkannya kebijakan tata niaga baja pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, diperkirakan stok baja nasional akan beranjak normal. Setelah sebelumnya stok baja lokal menggunung akibat digelontor produk impor, harapan pulihnya kondisi baja dalam negeri akhirnya menyala kembali. Permendag ini sendiri diterbitkan 18 februari 2009 dan mulai berlaku pada 1 April 2009 hingga 31 Desember 2010. Kebijakan pemerintah ini untuk memperketat impor 202 jenis produk baja tertentu.

Kondisi baja nasional memang sangat membingungkan belum lama ini. Di tengah total produksi baja yang berkisar antara 5 hingga 6 juta ton, ternyata volume impor sampai mencapai 3,4 juta ton. Padahal konsumsi baja dalam negeri paling antara 8 hingga 10 juta ton.

Menurut Dirjen Perdagangan Luar Negeri Depdag, Diah Maulida, kebijakan tersebut mewajibkan importer baja terlebih dahulu memberikan laporan rencana impornya dalam satu tahun sebagai syarat untuk mendapatkan status sebagai Importir Terdaftar (IT) atau Importir Produsen (IP). Status tersebut harus berdasarkan pertimbangan teknis dari Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian dan hanya berlaku satu tahun. Meski kemudian dapat diperpanjang melalui persetujuan Depperin. Selanjutnya tidak akan ada kewajiban untuk memberikan laporan untuk setiap pengapalan. Sementara dalam Rencana Impor Barang (RIB) setahun, importer diwajibkan menyatakan jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 digit, jumlah dan pelabuhan tujuan. ▲



Harga Karet Lengket, Lahan Tergencet

Nasib karet memang seakan tak putus dirundung malang. Setelah jungkir balik memperjuangkan harga, kini komoditas tersebut lengket di level 1,31 dolar AS per kilogram. Suatu harga yang cukup mengkhawatirkan, karena rentan terpuruk ke level yang lebih menyedihkan. Apalagi memang belum terlihat tanda-tanda menuju perbaikan. Kondisi ini dipicu belum normalnya permintaan karet China serta krisis ekonomi global. Belum lagi bertarung untuk urusan harga, kini karet pun mulai ditinggalkan petaninya yang kini lebih memilih bertanam kopi atau lainnya.

Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), Suharto Honggokusumo, indikasi konversi lahan perkebunan karet itu memang semakin kencang terutama untuk beberapa wilayah produsen karet lokal, seperti Kalimantan dan Lampung. Meski tidak berani memprediksi kapan kondisi permasalahan karet ini akan berakhir, dia mengaku khawatir jika lahan perkebunan karet akan berubah menjadi kebun kopi.

Pada akhir tahun lalu, Indonesia sudah memangkas produksi karet sebesar 30 persen melalui tekanan terhadap frekuensi penyadapan demi penurunan suplai ke pasar internasional. Hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan harga karet ke level 2 dolar AS per kg. Selain itu juga dilakukan pengendalian produksi melalui peremajaan tanaman. Sementara, kredit revitalisasi karet juga sudah dialokasikan pemerintah. ▲

Subsidi SRG Rp 50 M



APBN 2009 mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar untuk subsidi SRG. Alokasi anggaran itu datang dari inisiatif DPR-RI, yang mengharapkan pemerintah dapat mengembangkan SRG di Indonesia. Stimulus ini diharapkan menambah keyakinan perbankan untuk memasuki bisnis resi gudang.

Implementasi sistem resi gudang (SRG) di Indonesia memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu waktu berproses hingga melekat bagi kepentingan pelaku usaha dan utamanya kalangan petani. Di beberapa negara instrument pembiayaan alternative ini berjalan dengan sukses dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal itu terjadi berkat dukungan dari berbagai pihak.

Di awal tahun 2009, ini, mengalir kabar baik pengembangan SRG di Indonesia. Pihak legislative, khususnya Komisi VI, DPR RI, menyokong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran subsidi bunga. Dana subsidi itu digelontorkan dari APBD 2009 senilai Rp 50 miliar.

Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Deddy Saleh yang ditemui juga membenarkan hal tersebut. Bahkan menurut Deddy, persetujuan DPR untuk pengalokasian dana subsidi bunga itu sudah dihembuskan sejak Desember 2008, lalu.

"Subsidi bunga SRG Rp 50 miliar untuk tahap awal sudah lumayan besar. Dan yang terpenting dari mengalirnya subsidi itu, adanya dukungan DPR RI. Yang menyakini pentingnya pengembangan instrument pembiayaan ini di Indonesia," kata Deddy Saleh.

Menurut rencana Bappebti, penerima fasilitas subsidi tersebut tentu saja daerah-daerah penyelenggara resi gudang, terutama daerah-daerah yang baru mengembangkan program ini. Daerah-daerah

yang sudah mengembangkan SRG diantaranya Indramayu, Banyumas, Gowa, Jombang dan Karang Anyar. Sementara tahun 2009, ini, rencananya Bappebti akan memperluas daerah percontohan lain seperti di Maluku, Manado, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jambi dan Lampung.

Ketua Komisi VI DPR RI, Totok Daryanto, saat sosialisasi SRG di Bantul, Yogyakarta, 17 Februari 2009, mengatakan, kami menyakini SRG bisa berjalan di Indonesia. Karenanya, pada saat pembahasan anggaran tahun 2009, DPR mengajukan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana subsidi.

"Inilah bentuk dukungan DPR. Jadi tidak selamanya DPR berseberangan dengan pemerintah. Program inikan sangat dibutuhkan rakyat, dan menjadi kewajiban DPR untuk mendorong berjalannya SRG," papar Totok, kepada sejumlah wartawan, di Bantul.

Menurut Totok Daryanto, subsidi bunga SRG sebesar Rp 50 miliar sudah termasuk besar. Sebab implementasi SRG baru berjalan di beberapa tempat.

"Kita akan lihat realisasinya di tahun 2009, ini, apakah mencapai target. Kalau memang dianggap kurang, untuk tahun 2010 akan kita tambah. Kenapa tidak? Inikan untuk kepentingan rakyat," tegas Totok.

DIY Pertama

Sementara itu, Kepala Bappebti Deddy Saleh, kepada peserta sosialisasi resi gudang, di Bantul, mengutarakan, kota Yogyakarta ditetapkan sebagai awal dilaksanakannya sosialisasi SRG untuk tahun 2009.

Ini merupakan pilihan yang tepat, mengingat Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang memiliki keanekaragaman seni, budaya maupun sumber daya alam. Selain memiliki produk unggulan seperti kerajinan batik, tekstil, garmen, kerajinan perak, kayu, furniture dan anyaman, Yogyakarta juga memiliki potensi di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

"Dari produk-produk yang dihasilkan itu, terdapat beberapa produk yang berpotensi masuk dalam skema SRG. Seperti, teh, kopi tembakau, kakao, lada kelapa, vanili dan tebu," tambah Deddy.

Lebih jauh dikatakan Deddy Saleh, untuk penyaluran dana subsidi itu, Bappebti tentu saja sudah mempersiapkan persyaratan. Diantaranya, petani pemilik dokumen resi gudang yang akan mengajukan kredit mendapatkan subsidi bunga sebesar 50 persen dari bunga bank.

"Kalau saat ini bunga bank komersial sekitar 15 persen, maka petani akan menikmati bunga bank sebesar 7,5 persen," jelas Deddy.

Diakui Deddy Saleh, tingginya suku bunga bank menjadi salah satu kendala implementasi SRG. Oleh karena itu, dana subsidi pemerintah tersebut dialokasikan pada subsidi bunga bank.

"Harapan kami sesungguhnya dana subsidi ini bisa dialokasikan pada bidang lain. Misalnya membantu pendirian atau pembenahan gudang penyimpanan. Karena fasilitas ini merupakan sarana yang vital dalam penerapan sistem resi gudang," kata Deddy Saleh.

Mungkin untuk tahun mendatang, kami akan mengajukan dana subsidi yang lebih besar lagi agar

dapat dimanfaatkan pada bidang lain. Kalau pun dana subsidi Rp 50 miliar ini masih cukup, kami akan coba membantu di bidang lain. Seperti alat pengering gabah, sewa gudang dan lainnya. Tetapi tentunya itu atas seizin DPR, tambahnya.

Saran Sosialisasi

Sementara itu, kritik dan saran juga mengalir dari berbagai pihak untuk pengembangan SRG di tanah air. Guru Besar Universitas Lampung yang juga merupakan ekonom *senior Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Bustanul Arifin, menyoroti masalah sosialisasi SRG. Menurutnya, bentuk sosialisasi SRG tidak efektif dan harus segera diubah.

Dijelaskannya, jika sosialisasi dengan jalan penyuluhan tidak lebih dari teori komunikasi umum, sehingga wajar jika sampai saat ini SRG masih sulit untuk diimplementasi. Karena kendala utama terletak dari belum pahamnya petani mengenai SRG ini. Hal ini juga yang menyebabkan pihak Perbankan seakan enggan memberikan dukungan dalam urusan kredit. Dia mencontohkan, pihak bank seperti Bank Rakyat Indonesia masih membantu dalam wialyah *pilot project*, namun implementasi riil belum disentuh.

Bustanul menyarankan agar Bappebti dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berada di wilayah percontohan SRG. Misalnya, bekerja sama dengan pihak universitas sebagai lembaga yang nantinya melakukan proses sosialisasi tersebut. Meski dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan pendampingan. ▲

► Agenda FOTO ◀



Kunjungi SHEF, SHANGHAI

Shanghai Futures Exchange (SHFE), pada tahun 2008 mencatatkan transaksi kontrak berjangka mencapai 171 juta kontrak, meningkat sekitar 50 persen dibandingkan tahun 2007. SHFE memperdagangkan 5 jenis komoditi utama, yakni cooper, natural rubber, zinc, alumunium dan fuel oil. Kepala Bappebti dan rombongan diterima Executive Vice President, SHEF, Mr. Teng Jiawei.

Selain mengunjungi SHEF, Kepala Bappebti dan rombongan juga mengunjungi Shanghai Futures Association, dan 2 Perusahaan Pialang teraktif yaitu Success Internaitonal Billion, Ltd, dan Shanghai Tonglian Futures Brokarage Co. Ltd di kota Shanghai, China pada tanggal 14 - 16 Januari 2009.



Pembekalan Arbiter BAKTI

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) mendorong penyelesaian perselisihan antara investor dan nasabah di luar pengadilan, melalui musyawarah untuk mufakat maupun melalui mediasi. Dalam mempersiapkan arbiter yang handal di bidang perdagangan berjangka, BAKTI menggelar acara pembekalan arbiter di Bogor, 17 – 18 Januari 2009. Pembicara dari berbagai instansi ikut mewarnai pembekalan itu. Usai acara pembukaan, Kepala Bappebti Deddy Saleh, Mantan Hakim Agung, Bagir Manan serta para pembicara dan pengurus BAKTI berpose bersama.





Sarasehan Bappebti dan Pialang Berjangka

Kepala Bappebti, Deddy Saleh dan Eselon II Bappebti, melakukan sarasehan dengan pialang berjangka di kantor PT. Harumdana Berjangka, 30 Januari 2009. Pertemuan dilakukan terkait dikeluarkannya beberapa peraturan baru oleh Bappebti, khususnya tentang penetapan besarnya permodalan bagi penyelenggara dan peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).



Bahas PTT Bursa dan Kliring

Bappebti bersama Direksi BBJ dan KBI lakukan pembahasan Peraturan Tata Tertib (PTT) di Jakarta, 12 – 13 Februari 2009. Kepala Bappebti, Deddy Saleh, mengatakan pembahasan PTT BBJ dan KBI perlu dilakukan sebagai respon terhadap perkembangan perdagangan berjangka di Indonesia, dan antisipasi terhadap perkembangan ke depan.

●●●● Jajaran BBJ ●●●● Bertemu Bappebti

Pejabat Bappebti melakukan pertemuan dengan para pemegang saham, komisaris, dan direksi Bursa Berjangka Jakarta di Hotel Shangrila Jakarta, 11 Februari 2009. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka menyatukan persepsi mengenai arah pengembangan industri perdagangan berjangka di Indonesia. Isu lain yang dibahas antara lain, upaya meningkatkan likuiditas perdagangan multilateral, legitimasi BBJ dalam perdagangan bilateral (SPA), *law enforcement* serta rencana swastanisasi lembaga kliring berjangka.



CABAI

Si Pedas dari Amerika

*Orang Indonesia mana
nggak doyan cabai?
Kecuali, mungkin orang
yang bermasalah berat
dengan urusan pencernaan.
Atau orang yang sedang
mengidap penyakit wasir.
Karena rasanya yang pedas
dan panas, dapat menjadi
penambah selera makan tak
tertandingi. Adalah Wilbur
Scoville, yang menemukan
alat ukur kepedasan cabai.
Dan dengan alat ukur itu,
dapat dipastikan penikmat
makanan berbasis cabai
tidak akan mengeluh.*

Meski Indonesia jadi negara di mana cabai dapat tumbuh segar dan tersebar di seluruh wilayah negeri ini, ternyata cabai bukan merupakan tanaman yang berasal dari bumi pertiwi. Diperkirakan, tumbuhan ini "nyasar" dari benua Amerika, lalu menyebar ke wilayah Eropa hingga ke Asia termasuk ke nusantara.

Tetapi di Indonesia, cabai (*capsicum annum*) sangat dicintai. Coba carilah rumah makan mana yang tidak menyediakan cabai di Indonesia? Rasa-rasanya, baik itu warteg atau pun restoran terkenal sekalipun, apalagi yang namanya rumah makan masakan padang pasti akan menyajikan hidangan pedas dari cabai ini. Entah itu untuk gulai atau beraneka jenis sambal.

Walaupun di Indonesia juga dikenal rasa pedas dari bumbu masakan lain seperti merica, tetapi mengonsumsi cabai tetap terasa menjadi ritual istimewa. Cukup dipetik langsung dari pohonnya, gigit langsung atau sebelum masuk mulut "disandingkan" dengan makanan gurih terlebih dahulu. Lalu rasakan sensasinya yang luar bi-

asa, atau sering diistilahkan orang dengan "pecah dimulut".

Sensasi itu karena memang cabai mengandung zat *capsaicin*, yaitu zat yang bersifat seperti minyak dan "membakar" sel-sel pengecap di lidah sehingga menciptakan rasa pedas tersebut.

Dan rupanya, tingkat rasa pedas cabai dapat diukur dengan satuan *scoville*. Satuan ukur ini dikembangkan Wilbur Scoville, pada tahun 1912. Satuan ini mengukur tingkat kepedasan dalam skala 0 - 300.000, yang didasarkan pada pengukuran konsentrasi ke-larutan.

Dalam proses pengukuran ini, bubuk cabai murni dilarutkan dalam larutan air dan gula, dan diukur dengan panel khusus sambil dikurangi konsentrasinya. Kemudian kadar bubuk cabai murni yang larut sampai tidak ada rasa pedas lagi akan menjadi angka hasil pengukuran tersebut.

Dari hasil pengukuran ini, selanjutnya cabai-cabai ini dapat dikelompokkan menjadi menjadi cabai manis, agak pedas, pedas sedang, pedas, dan sangat pedas. Cabai manis biasanya

berkisar pada skala 0 - 1.000 dalam satuan Scoville. Contohnya cabai manis adalah paprika yang biasa disajikan pada makanan berbasis salad. Juga cabai seperti *pimentos*, *rellenos*, dan *sweet banana peppers* termasuk dalam kelompok ini.

Sementara cabai berskala 1.000 - 3.000 digolongkan dalam kelompok agak pedas. Mungkin kelompok ini sepertinya tidak akrab dengan kita.

Cabai merah besar yang biasa kita temui dan kita makan itu masuk di kelompok pedas sedang, dengan skala 3.000-6.000 satuan Scoville. Di kelompok ini juga ada cabai yang sangat terkenal di Meksiko, yaitu *jalapeno*. Kelompok cabai ini sangat pedas, pada skala 6.000-50.000 satuan Scoville. Contohnya di nusantara dengan mudah dapat kita temui, bentuknya kecil dan mungil dengan rasa super "nyeλεκit" yakni, cabai rawit.

Lalu ada kelompok cabai yang terakhir, berskala 50.000-300.000 satuan

nah terdengar ada orang yang kapok makan cabai. Karena cabai memang seperti menjadi bagian kegiatan rutin kuliner nan menggoda. Tengoklah segala kegiatan cemilan asli bangsa kita. Apakah itu tahu goreng, tempe mendoan, combro, bala bala, bakwan udang atau jagung, memang lebih enak jika "diselipi" cabai. Entah itu irisan cabai merah maupun cabai rawit bulat yang dahsyat itu. Belum lagi untuk jenis makanan lainnya. Pokoknya semua makanan bangsa kita itu sepertinya tidak jauh dari yang namanya cabai. Mungkin cuma minuman dan penganan mengandung gula saja yang tidak bersinggungan dengan si cabai ini.

Bibit Impor

Di Indonesia, sentra cabai dapat ditemui di beberapa daerah, diantaranya Brebes, Tegal, Rembang. Di Pulau Jawa, produksi cabai mencapai sekitar 65 persen, dimana produksi cabai per bulan sekitar lebih dari

iklim, tentu saja juga ada kecocokan untuk urusan lidah dan perut. Bahkan di Indonesia, yang dalam kenyataan wilayahnya dapat menumbuhkan cabai di mana saja, tetap "kehausan" untuk urusan mengkonsumsi si pedas ini. Sehingga harus menorehkan catatan impor segala untuk urusan benih.

Biasanya benih cabai diimpor dari negara Taiwan, Thailand dan Korea Selatan. Dalam urusan harga, benih cabai impor dan lokal jelas jauh berbeda. Perbandingannya, harga benih cabai impor sekitar Rp 80 ribu per 10 gram. Sedangkan untuk ukuran yang sama, cabai lokal hanya sekitar Rp 11.500.

Dan memang harga berbicara dalam urusan ini. Sebab benih impor memiliki keunggulan tersendiri. Baik itu dari ketahanan simpan yang lebih lama dan produktivitas yang tinggi.

Tetapi berdasarkan data pihak peneliti di Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) diketahui, meski cabai dari benih impor memiliki berbagai keunggulan ketika ditanam, tetapi soal bentuk dan rasa boleh diuji.

Cabai lokal kadang terlihat tidak menarik, karena tidak berwarna merah menyala dan mulus. Tetapi ketika diulek, cabai lokal ternyata lebih liat. Kalau urusan perbandingan ini, silahkan bertanya pada ibu rumah tangga yang doyan mengulek sambal di rumah. Tentu mereka akan lebih memilih cabai lokal ini, karena hasil ulekkannya dapat lebih terlihat lumat dan halus daripada cabai dari benih impor.

Untuk kepentingan itulah peneliti mengembangkan berbagai varietas cabai lokal. Dan pihak Balitsa, Badan Litbang Pertanian, telah mencoba mengangkat varietas lokal dengan melakukan pemuliaan. Sejumlah varietas cabai lokal yang memiliki keunggulan seperti varietas Tanjung 1, varietas Tanjung 2, dan varietas Lembang 1. Produk lokal ini memiliki karakteristik berpotensi hasil sekitar 9 - 18 ton per hektar, umur genjah, cocok di tanam didataran rendah dan sedang. Semoga dari upaya pengembangan varietas local itu kita tidak lagi sibuk bergantung pada impor. ▲



Scoville atau tingkat sangat pedas. Berdasarkan pengukuran, predikat cabai terpedas jatuh pada jenis cabai *habanero*. Dengan tingkat kepedasan lebih dari 300.000 satuan Scoville! Dan memang, nampaknya perlu kemampuan lebih untuk menyantap cabai "luar biasa" ini dalam jumlah banyak. Meski mengkonsumsi cabai di mulut kadang terasa "meledak" seperti menelan mercon, tetapi belum per-

70 ribu ton. Apalagi menjelang hari raya biasanya jumlah ini juga mengalami peningkatan karena permintaan yang naik lebih dari 10 persen. Dan uniknya, memang cabai justru lebih memiliki eksistensi penggunaan di Asia ketimbang dari Amerika, asal nenek moyangnya. Apalagi proses kesuksesan penyebaran cabai di daratan Asia memang karena terdapatnya kecocokan iklim. Selain kecocokan

Menu *Maknyus* Serba Cabai



Bagi anda yang gemar menikmati masakan asli nusantara, terutama yang banyak mengandung unsur cabainya, maka berikut ini ada pilihan-pilihan menu unik dan menarik. Anda dipersilahkan mencobanya di rumah, dan ditanggung rasanya dapat membuat mulut “melepuh” dan kepala “pecah”. Kami memilihkan menu yang padat aroma pedasnya, dimana potongan cabai nampak penuh menyelimuti masakannya. Silahkan mencoba!

Lidah Masak Cabe

Bahan: 500 gram lidah sapi rebus, dikupas selaputnya lalu potong kotak-kotak sekitar 2 cm. 350 ml kaldu, 15 buah cabe merah (dipotong 1 cm), 15 buah cabe hijau (dipotong 1 cm), 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas yang dimemarkan, 2 batang serai, dimemarkan, 3 sendok makan kecap manis, ½ sendok teh garam

Bumbu iris: 3 cm kencur, 4 cm kunci, 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah tomat segar, ½ sendok teh gula pasir, 1 ¼ sendok teh garam

Cara membuat: Tumis bumbu iris, cabe merah, daun salam, lengkuas dan serai sampai harum. Masukkan lidah sapi, aduk-aduk sebentar lalu tuangkan kaldu. Tambahkan kecap manis dan garam, kemudian masak hingga matang.

Saga Cabek Ayam

Bahan: 1 ekor ayam, dipotong 10 bagian, 1 liter air, 3 sendok makan minyak untuk menumis

Bumbu halus: 20 buah cabe merah, 5 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 1 sendok teh terasi, 2 buah tomat segar, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh gula merah

Cara membuat: Tumis bumbu halus sampai matang, masukkan ayam sambil diaduk hingga berubah warna. Tuangkan air kemudian masak sambil terus diaduk hingga matang dan mengental.

Krecek Cabe

Bahan: 350 gram daging sandung lamur, direbus sampai empuk kemudian dipotong ukuran 2x2 cm. Jangan lupa ambil kadu dari rebusan ini sebanyak 250 ml. 100 gram kerecek yang sudah digoreng. 5 buah cabe hijau, dipotong miring ukurang ½ cm. 15 cabe rawit merah, 1 cm lengkuas yang dimemarkan, 5 lembar daun jeruk, 8 sendok makan kecap manis, 750 ml santan dari sebutir kelapa, 1 sendok teh garam, 1/8 sendok teh gula, 20 butir telur puyuh rebus, 2 sendok makan minyak untuk menumis.

Bumbu halus: 5 cabe merah (dibuang bijinya), 8 bawang merah, 2 siung bawang putih, 5 butir kemiri yang disangrai.

Cara membuat: Tumis bumbu halus

sampai harum. Tambahkan cabe hijau, lengkuas dan daun jeruk serta rawit merah. Aduk terus hingga layu. Masukkan daging, aduk-aduk sebentar kemudian tambahkan kecap manis, garam dan gula. Aduk hingga merata. Tuangkan santan dan masak hingga mendidih. Lalu tambahkan kerecek dan telur puyuh. Biarkan kerecek hingga lunak, baru tuangkan kaldu dan masak hingga mendidih.

Gulai Kacah

Bahan: 400 gram usus sapi, 300 gram paru sapi, 300 gram daging sapi, 2 lembar daun kunyit, 3 lembar daun jeruk purut, 2 batang serai yang dimemarkan, 2 buah asam kandis, 2 ribu ml air.

Bumbu halus: 150 gram cabe merah, 10 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 cm kunyit, 2 cm jahe, 4 cm lengkuas, 4 sendok teh garam.

Cara membuat: Rebus usus, paru, daging, daun kunyit, daun jeruk, serai dan asam kandis sampai mendidih. Lalu potong kotak-kotak usus, paru dan daging tersebut. Sisihkan. Masukkan bumbu halus dan daging, masak sampai lunak sambil sesekali tetap diaduk hingga kuah mengental.

Bandeng Mandi Cabe

Bahan: 2 ekor ikan bandeng segar ukuran sedang, potong dua bagian. 20 cabe rawit segar, 2.500 ml air, 1 cm asam jawa, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, 2 bungkus kaldu sapi atau ayam (boleh jenis kotak atau bubuk), 2 lembar daun salam, 1 batang serai (dimemarkan), 1 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan minyak untuk menumis, 3 cm lengkuas, dimemarkan.

Bumbu iris: 3 cm kunyit (iris tipis), 3 cm jahe (iris tipis), 2 batang daun bawang (potong 1 cm), 1 buah tomat segar, 5 butir bawang merah, iris halus, 2 butir bawang putih, iris halus.

Cara membuat: Tumis bumbu iris sampai harum, lalu masukkan bandeng dan beri air. Masukkan juga semua bahan dan masak bandeng hingga mendidih. Angkat jika air sudah terlihat agak menyusut. Mengenai rasa, bumbu dapat ditambah sesuai selera. Jangan lupa, sajikan hidangan selagi hangat. ▲



swap rates -- more than quadruple the spread of 77 basis points that National Grid offered in May to borrow 750 million euros for five years.

In the U.S., Heinz posted a second-quarter profit two weeks ago that beat analysts' estimates and reiterated its full-year earnings forecast. You have to think that frozen TV dinners and ketchup are about as recession-proof as it gets.

That didn't shelter the company from having to more than double the interest it pays on \$800 million of debt last week.

The Heinz bonds are known as remarketable securities, meaning they have trigger dates when the issuer either repays its lenders in full, or has to seek a new market rate at which investors are willing to renew the securities.

Payment Burden

For the past three years, Heinz has been paying semi-annual interest of 6.428 percent on the debt. For the next three years, Heinz will pay 15.59 percent. Put another way, Heinz will hand out almost \$374 million in six interest payments between now and 2011, when the next reset is due. At the previous interest rate, those payments would have cost the

company just \$154 million.

Ten years ago, Heinz was able to borrow \$250 million for 30 years paying a yield of 6.41 percent, about 80 basis points more than 30-year U.S. government debt yielded at the time. Back then, Heinz enjoyed a rating of A1 from Moody's, four levels below the top grade.

Today, Heinz has slipped a further four positions down the Moody's rating scale, to Baa2. Given where the company pitched the issue price on its remarketable bonds, Heinz is paying a premium of more than 1,000 basis points to U.S. Treasuries for three-year money.

Lights Out

None of this makes Heinz or National Grid more suspect financially than their peers. They just have the misfortune to have publicly traded securities out there, squawking like canaries in the corporate-credit coalmine that borrowers would prefer to keep dark for the time being.

Much murkier things are undoubtedly happening off the radar screen. God only knows what conversations companies that are close to breaching loan covenants are having with their banks in the current environment.

"All funding alternatives for corporates have become more restrictive in 2008, and we see little change in 2009," Royal Bank of Scotland Group Plc's credit strategists, led by head of research Kit Juckes, wrote in a research note this week. "Bond issuance by those that can will be brisk, while issuers in more cyclically exposed sectors will increasingly have to 'play the relationship card' with core banks to obtain term funding."

Merrill Lynch & Co. estimates that operating earnings at U.S. companies dropped by almost 18 percent in the third quarter, based on the 96 percent of companies in the S&P 500 index that had posted results. That is 14 percentage points worse than the consensus forecast among analysts at the end of September. A measure Merrill calls last-12-month earnings growth slumped 22.9 percent, the worst since 1990.

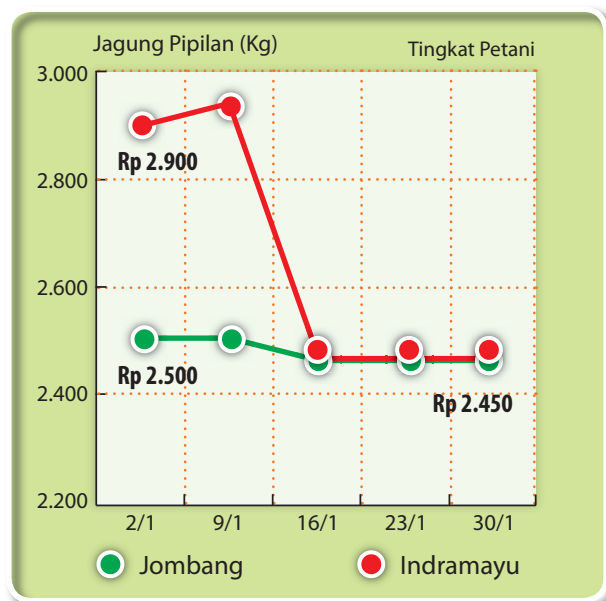
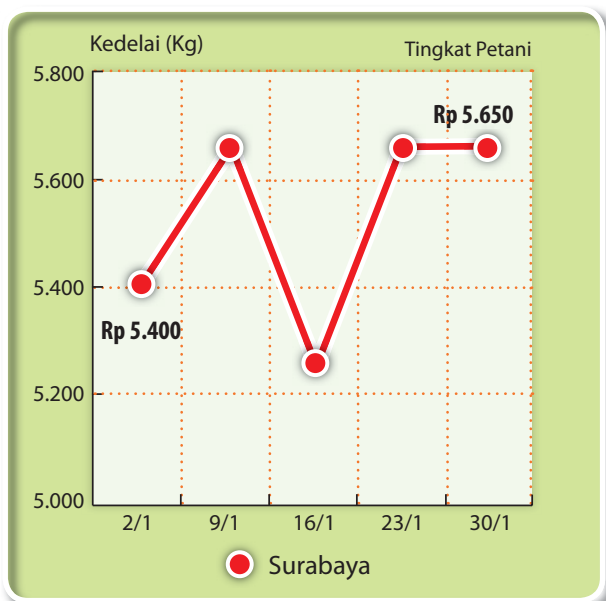
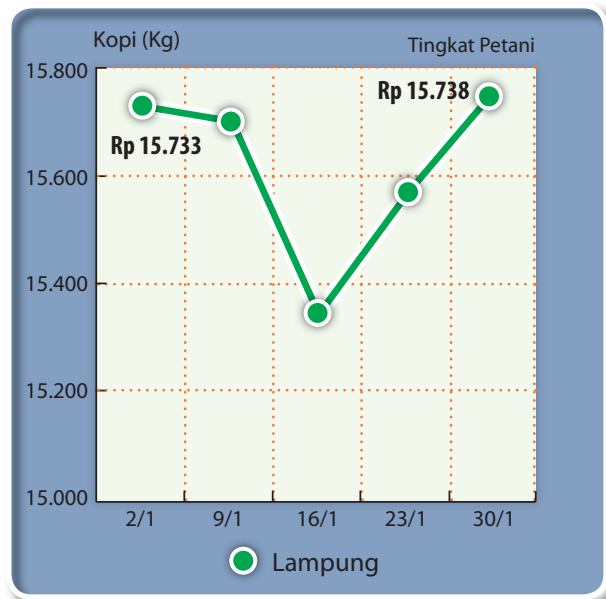
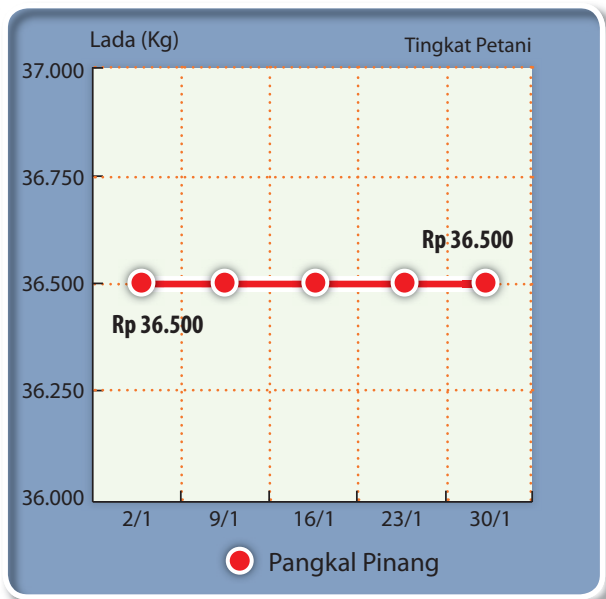
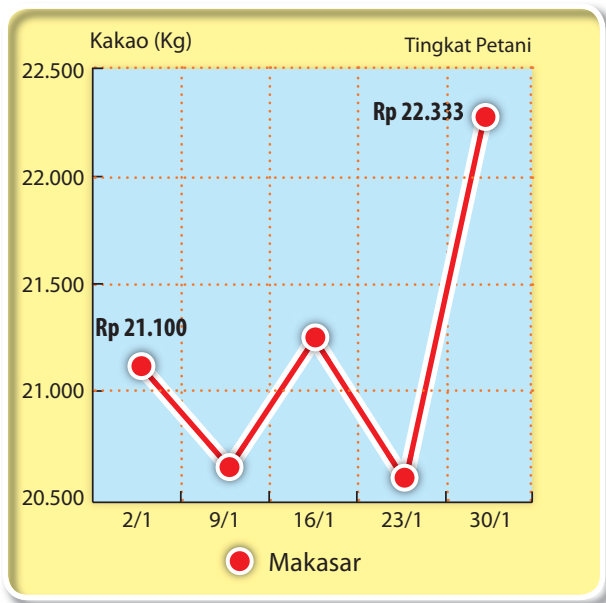
Evolve or Die

All of which illustrates the folly of government threats to dragoon the banks they have underpinned with public funds into soft-pedaling in negotiations with customers old and new. Incautious lending played a big part in creating the crisis. Government-sponsored recklessness will prove no less dangerous.

Not everyone who wants a home can qualify for a mortgage to realize that dream. Companies that have to roll over their debt will pay a high price for the privilege, and some of them may go bust under the weight of increased interest payments. The denouement of the credit crunch will be messy.

Still, as painful as Darwinism is, it beats Creationism every time, in markets as in nature. ▲

**) Mark Gilbert is a Bloomberg News columnist. The opinions expressed are his own.*



Wacana Bursa Tandingan

BBJ rindu kembali kepada jiwanya, yakni perdagangan komoditi primer. Tenaga ahli pun dicari. Meski masih perlu berbenah diri, bursa tandingan tak perlu ditakuti.

Sebagai Direktur Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang baru, Edi Susmadi tentu merencanakan banyak hal untuk melakukan perubahan besar ke arah perbaikan. **Bulletin Berjangka**, mengurai pemikiran baru tersebut serta opininya terhadap kondisi bisnis perdagangan berjangka saat ini. Berikut ini petikan narasi dari perbincangan yang dilakukan di ruang kerja Edi Susmadi, di gedung Annex, BDN Lt.2 Jalan M.H Thamrin No. 5 Jakarta Pusat.

Rindukan Komoditi

BBJ sendiri-kan jiwanya bursa berjangka komoditi. Jadi pada saat ini, saya simpulkan bahwa BBJ sangat serius untuk memikirkan dan mengimplementasikan bahwa komoditas bursa berjangka itu kembali pada jiwanya. Yaitu di sektor komoditi primer. Dan komoditi itu prinsipnya bisa apa saja, yang penting bisa diterima oleh masyarakat- investor. Tetapi pada saat ini menitikberatkan dulu kepada agro komoditi, sektor pertanian. Yang lain menyusul. Karena derivative dari sektor pertambangan juga banyak.

Yang kedua, langkahnya kita sangat ingin sekali mendatangkan para ahli di bidang bursa berjangka untuk mengevaluasi kinerja BBJ. Tujuannya, membuat study tentang komoditas apa yang akan ditawarkan

ke masyarakat itu. Dan untuk itu, BBJ berupaya keras mencari jalan keluar di tengah terbatasnya dana yang dimiliki. Jadi kita berupaya termasuk saya sendiri untuk mencari celah-celah yaitu untuk mencari bantuan hibah, atau yang kita sebut dengan *grant*.

“Ada beberapa perwakilan negara asing di Indonesia yang biasa membantu dan memberi dukungan untuk pengembangan sektor ekonomi. Mungkin BBJ akan mencoba memanfaatkan peluang itu.”

Karena kalau BBJ bisa maju, akan mengairahkan sektor makro. Sebab, BBJ akan memainkan peran sebagai instrument perdagangan berjangka yang menyampaikan informasi fluktuasi harga. Hal ini pada akhirnya akan membuat orang bergairah memperluas bisnisnya pada sector komoditas.

Pada saat ini saya sedang melayangkan beberapa koresponden ke perwakilan-perwakilan negara asing di Indonesia dan di Jakarta. Apa itu institusi, *consulting fund*, atau pun LSM asing maupun dai dalam negeri. Kemarin ada respon juga, tetapi respon itu dari Indef. Salah satu Direktornya, Ikhsan Modjo, sudah bicara dengan saya.

Dalam pembicaraan itu, saya jelaskan banyak hal tentang perdagangan berjangka komoditi

dan kurang bergairahnya kontrak komoditi diperdagangkan BBJ. “Namun, dari pembicaraan itu belum ada yang bisa dijadikan program kerjasama. Hanya saja Ikhsan Modjo, berjanji akan membantu dan mendukung mendapatkan *grant*.”

Tetapi fokus saya mencari tenaga ahli yang betul-betul ahli men-*set up* bursa berjangka. Itu fokusnya. Selanjutnya baru perbaikan SDM, structure-nya dan lain-lain.

“Tetapi yang lebih penting adalah tenaga ahli yang memang sudah berpengalaman terlibat di dalam bursa berjangka.”

Tenaga ahli dimana saja ada di dunia ini. Tetapi yang ada *related* dengan komoditasnya Indonesia. Dan itu tidak gampang. Itu pun kalau dapat biayanya sangat besar. Target saya upaya mendapatkan tenaga ahli itu harus tercapai di tahun 2009, ini. Meski belum terwujud di tahun ini, paling tidak sudah ada respon.



Bikin BBJ Melek

Bursa Tandingan

Kalau menurut kacamata saya, bursa tandingan merupakan kompetisi bagi BBJ dan merupakan hal positif. Jadi BBJ harus *melek*. *Lho*, ada orang lain yang mau mendirikan bursa lagi dengan sistem yang lebih baik! Itu harus kita dukung. Tetapi yang penting kompetisi itu berada dikoridornya.

Dan ini men-*trigger* bahwa BBJ harus lebih mempersiapkan lagi semuanya. Apakah itu infrastrukturnya, tim bankernya, direksinya harus lebih proaktif lagi. Dan itu bukan artinya negatif. Karena di negara-negara lain, sepengetahuan saya, tidak ada peraturan yang membatasi bursa berjangka itu hanya satu saja.

Di negara lain itu kadang-kadang juga ada bursa yang sama, tetapi kontrak yang diperdagangkan berbeda. Dua macam bursa berjangka seperti itu hal yang lumrah. "Saya secara pribadi, merasa

sangat *welcome*. Karena orang di dunia bisnis kalau tidak ada *competitor*, dia akan merasa segalanya. Tetapi dengan adanya *competitor*, kita jadi terpacu lagi untuk memperbaiki kinerja kita. Kita harus tertantang. Sejauh regulasi tidak membatasi, menurut saya itu sangat wajar sekali."

Compliance Director

Bicara tentang sistem perdagangan alternative (SPA), yang selalu terpikirkan dibenak saya pikirkan, hal itu bukan target utama BBJ. Target utama BBJ adalah komoditas. Memang, SPA memberikan kontribusi yang besar terhadap BBJ, dan juga pelaku pasar lainnya. Itu wajar, karenanya BBJ melakukan fungsinya dengan memonitor perdagangan yang transparan dan sesuai aturan. Sehingga problem yang muncul dari perdagangan itu berkurang.

Supaya tidak terjadi kerucuhan-

kerucuhan, itu diperbaiki dengan adanya *compliance director*. Pejabat inilah yang memonitor perdagangan SPA perusahaan pialang dari hari ke hari. Bila terjadi klaim dari nasabah, dia harus mencari pemecahan masalah. Tetapi yang terpenting lagi adalah pencegahan dari masalah yang akan datang. Karena SPA ini bukan target dari BBJ, tetapi harus digiring dengan benar dan dibenahi. Salah satunya, SPA ini betul-betul harus kita masukkan ke dalam suatu wadah, sehingga dia punya akreditasi atau regulasi yang benar.

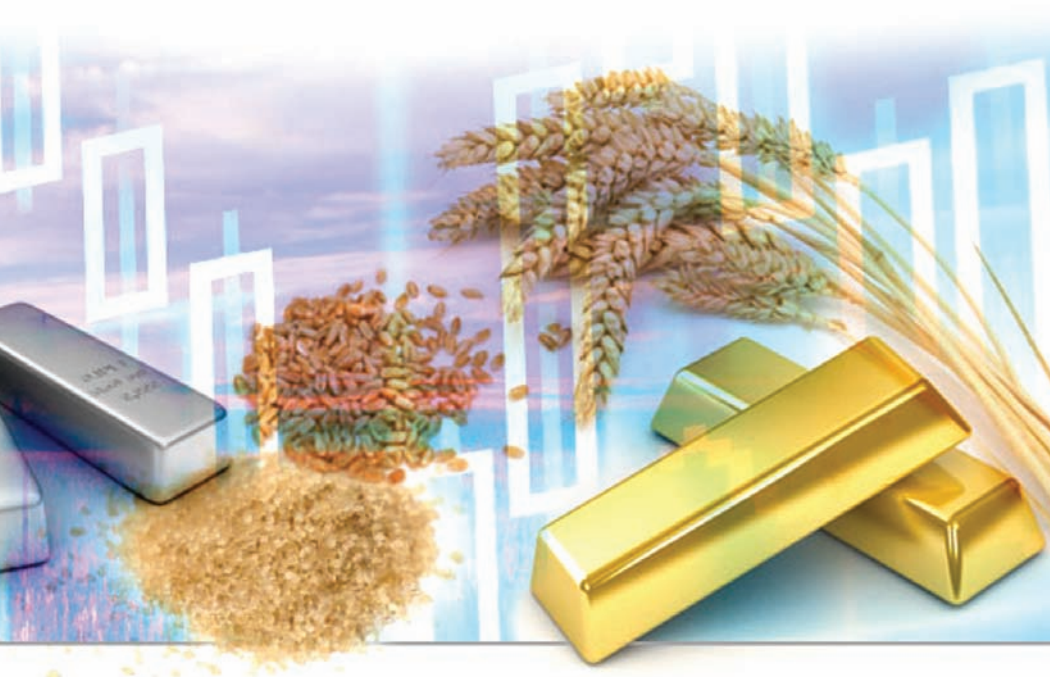
Direktur Baru

Mengenai pembagian tugas sehari-hari, sebenarnya tidak ada pembagian khusus dengan Pak Hasan (Dirut BBJ Hasan Zein Mahmud). Karena direktur itu merupakan satu tim di dalam target yang akan dicapai.

"Kita sedang mencari satu orang lagi direktur, apakah nanti akan dibagi untuk satu bidang khusus, 'nah itu nanti kita pikirkan."

Kapan direktur baru itu disaring? Mungkin sekitar Mei atau Juni 2009, ini. Dan hal itu sudah diamanatkan pada RUPS BBJ sebelumnya. Dan calon-calon yang akan menempati jabatan direktur baru itu pun nanti harus melewati *fit and proper test*.

Kembali ke soal pembagian tugas, ke internal kita ada, tetapi ke eksternal tidak ada pembagian jelas. Pokoknya *achievement* kita itu apa? Yakni, BBJ harus menciptakan perdagangan berjangka komoditas primer yang likuid. Tujuan itu harus bisa dicapai. Kita berharap ditahun 2009 ini tanda-tanda mecapai target itu sudah ada dan berjalan baik. ▲





PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR 64/BAPPEBTI/Per/1/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin kepastian hukum, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
- (2) Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.
- (3) Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;

- b. menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
 - c. menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;
 - d. menjelaskan peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi;
 - e. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan
 - f. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f terhadap seorang calon Nasabah hanya dapat dilakukan oleh Wakil Pialang yang sama.
- (5) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat melaksanakan kewenangannya, maka Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat digantikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang lain.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:
- a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor: IV.PRO.9.;
 - c. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10., dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11., serta Peraturan Perdagangan (*trading rules*) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon Nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.12.;
 - d. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - e. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah sesuai dengan Formulir Nomor: IV.PRO.13.;
 - f. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.14.;
 - g. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
 - h. menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10.; dan
 - i. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11.
- (2) Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Pemberian Amanat, Nasabah, dan Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.
- (3) Wakil Pialang Berjangka yang juga berstatus sebagai salah satu Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang Berjangka hanya dapat menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagai Wakil Pialang Berjangka atau Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pialang Berjangka bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang terkait dengan Pialang Berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka wajib:
 - a. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata cara penerimaan Nasabah yang disetujui oleh Bappebti;
 - b. membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah;
 - c. membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling sedikit meliputi:
 1. peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
 2. pengetahuan tentang komoditi dan Kontrak Berjangka;
 3. pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan risiko di bidang Perdagangan Berjangka;
 4. hak-hak dan kewajiban Nasabah; dan
 5. sarana penyelesaian perselisihan perdata.
 - d. menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
 - e. menjelaskan bahwa dana Nasabah harus ditransfer atau disetorkan ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
 - f. menjelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada Nasabah;
 - g. menyediakan sarana simulasi transaksi Perdagangan Berjangka bagi calon Nasabah;
 - h. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui Bappebti;
 - i. menyediakan ruangan perdagangan (*dealing room*) yang terpisah dengan ruangan penyelesaian (*settlement room*);
 - j. menyediakan sarana untuk transaksi secara langsung maupun tidak langsung;
 - k. merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam Kartu Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.15.;
 - l. mengkonfirmasi kepada Nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.16., dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh Nasabah;
 - m. menyampaikan Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) kepada Nasabah;
 - n. menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai sengketa keuangan;
 - o. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui Bappebti; dan
 - p. membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka dilarang:

- a. mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (bukan Warga Negara Indonesia) untuk berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka;
- b. mencari calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan;
- c. menerima setoran dana Margin awal Nasabah secara tunai;
- d. menerima setoran Margin untuk suatu rekening Nasabah yang pengirimnya tidak sama identitasnya dengan identitas Nasabah tersebut yang tertera dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- e. memberi pinjaman dana untuk Margin Nasabah;
- f. menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) kepada pihak lain selain Nasabah;
- g. menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (*settlement*) merangkap sebagai tenaga pelaksana transaksi (*dealing*) dan/atau sebaliknya;
- h. melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Nasabah menarik dananya (*withdrawal*);

- i. memindahbukukan dana Nasabah dari Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka ke rekening yang nama dan nomornya tidak sesuai dengan nama dan nomor Rekening Bank Nasabah untuk Penarikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi;
- j. menggunakan dana Nasabah yang terdapat di dalam Rekening Terpisah (*Segregated Account*) untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka; atau
- k. menyerahkan Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) kepada pihak lain kecuali Nasabah atau kuasanya.

5. Ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf f diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang:

- a. menerima surat kuasa dalam bentuk apapun dari calon Nasabah atau Nasabah kecuali kuasa tertentu yang diatur dalam Peraturan ini;
 - b. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*), atau bagi hasil (*profit sharing*);
 - c. membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan ini;
 - d. menerima dan menggunakan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*);
 - e. membuat atau mempublikasikan pernyataan yang tidak benar yang isinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; atau
 - f. menerima Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*).
6. Ketentuan-ketentuan dalam Formulir Nomor: IV.PRO.10. sampai dengan Formulir Nomor: IV.PRO.13. diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, semua Pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini paling lambat tanggal 31 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2009

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini
disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.

PLKA Sarana Pemasaran Ekonomi Kreatif

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, saat meresmikan pasar lelang komoditi agro (PLKA) DI Yogyakarta, secara spontan dikatakannya, “surprise, pasar lelang seperti ini bisa memasarkan berbagai macam produk. Saya pikir yang ditawarkan di pasar lelang ini hanya komoditi pertanian, tetapi juga produk-produk kerajinan hingga produk semi industri.”

Demikian antara lain dikatakan Mari Pangestu, mengawali sambutannya yang melihat demikian beragam produk yang ditawarkan PLKA DIY. Pelaksanaan PLKA DIY pada 16 Februari 2009, itu, diselenggarakan dengan kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY dengan Bank Pembangunan Daerah- BPD DIY.

“Jogja adalah daerah wisata, jadi cukup banyak produk-produk kerajinan yang dihasilkan dari daerah ini. Mungkin karena banyaknya perajin, jadi produk kerajinannya pun dipasarkan di pasar lelang. *It's ok!*,” kata Mari.

Dari laporan yang disampaikan, tambah Mari, pasar lelang ini juga menawarkan sapi potong dan kambing etawa. Dan ada pula produk-produk kemasan dalam botol. Jadi cukup beragam komoditi yang ditawarkan pasar lelang ini.

“Tapi tadi muncul pertanyaan dibenak saya. Apakah semua produk ini ada pembelinya?” kata Mari.

Namun dia pun melanjutkan, “mungkin karena ini adalah peresmian PLKA DIY, maka dipajang semua produk yang diminati konsumen. Itu sah-sah saja, tetapi usul saya untuk masa mendatang, agar pasar lelang ini lebih fokus dibuat segmentasi pasar

berdasarkan komoditi.

“Boleh saja pada suatu saat pasar lelang ini hanya menawarkan hewan teranak, di lain kesempatan menawarkan komoditi pangan seperti sayuran dan buah-buahan. Atau juga di lain waktu produk-produk kerajinan,” jelas Mari.

Lebih jauh dikatakan Mari, “dengan adanya segmentasi pasar seperti itu, pasar lelang pun bisa menjadi sarana pemasaran produk ekonomi kreatif. Pasar lelang Jogja sangat mungkin melakukan hal itu, karena di sini merupakan salah satu daerah wisata dan cukup banyak menciptakan produk-produk kreatif. Demikian pula daerah lain, seperti Bali, misalnya.”

“Pemerintah saat ini sangat *concern* mengembangkan ekonomi kreatif. Karena tanpa disadari sub-sektor ekonomi kreatif menjadi sumber pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Dan hemat saya, inilah salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global,” tegas Mari Pangestu

Itulah sekelumit kutipan sambutan Mari Pangestu yang disampaikan tanpa naskah pada peresmian PLKA DIY.

Multi Produk

Menyimak pemaparan Menteri Perdagangan itu, sejatinya PLKA menjadi sentra pemasaran produk-produk kreatif yang dihasilkan daerah. Hal itu telah diselenggarakan di beberapa daerah. Seperti di Jepara, Jateng. Daerah sentra produk furniture ini pada tahun 2006, pernah menyelenggarakan pasar lelang dengan menawarkan sejumlah produk furniture. Hanya saja, penyelenggaraan pasar lelang furniture Jepara ini tidak kontinu. Dan akhirnya berujung.

Namun lain halnya dengan PLKA Jabar. Boleh dibbilang, Jabar jadi pioner pasar lelang yang mensegmentasikan berdasarkan produk. Hingga saat ini PLKA Jabar rutin setiap hari Rabu, menyelenggarakan pasar lelang dengan single komoditi. Komoditi yang dipasarkan melalui PLKA ini, antara lain produk teh, beras, sayur-mayur dan bunga serta lainnya.





Dan dari pasar lelang pun kerap muncul permintaan komoditi yang tak lazim ditemukan dipasaran. Seperti saat penyelenggaraan PLKA Soropadan, Jateng, November 2008, lalu, dan disaksikan Gubernur Bibit Waluyo, dari kalangan pembeli muncul penawaran kencing sapi. Limbah ternak ini dibutuhkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. Harga yang ditawarkan pun cukup fantastis, perliternya kencing sapi dihargai Rp 7.000. Lebih mahal dari harga BBM saat ini yang hanya Rp 4.500 perliter.

Dari pasar lelang yang sama, ada pula permintaan pembeli di Balikpapan, Kalbar, yang membutuhkan bunga kamboja kering. Bunga kamboja ini diolah menjadi bahan baku pembuatan hio- alat sembahyang agama Budha. Serta bahan baku aromateraphi. Harga bunga kamboja kering mencapai Rp 12.000 per kilogram.

Kreatifitas Pemda

Di lain pihak, Kepala Bappebti, Deddy Saleh, dalam suatu kesempatan, mengatakan, pemerintah daerah seharusnya responsive dengan adanya program pemerintah pusat mengembangkan pasar lelang diberbagai daerah. Sebab, pasar lelang itu tidak saja bisa mengerakan ekonomi daerah. Tetapi juga menjadi sarana pemasaran berbagai produk yang dihasilkan masyarakat di daerah bersangkutan.

"Oleh karena itu, kami pun- Bappebti, menghimbau agar pemerintah daerah kreatif untuk memunculkan dan menawarkan komoditi unggulan

daerah di pasar lelang," jelas Deddy.

Lebih jauh dikatakan Deddy Saleh, harapan kami di masa mendatang PLKA yang ada diberbagai daerah itu bisa diselenggarakan secara *live-* yang dapat dipantau melalui internet. Sehingga, pembeli dari daerah lain yang tidak memiliki komoditi yang dibutuhkan daerah tersebut bisa secara langsung mengorder di pasar lelang.

"Jadi, dengan munculnya komoditi unggulan di pasar lelang, memungkinkan terjadi perdagangan antara daerah dengan frekuensi yang lebih tinggi," tambahnya.

"Apalagi penyelenggaraan pasar lelang yang mendapat dukungan dari perbankan akan membuat transaksi lebih efisien dan efektif. Diberbagai daerah itu 'kan sudah ada BPD, dengan menggunakan jasa mereka para penjual atau pembeli tidak perlu repot lagi soal urusan transaksi," jelas Deddy Saleh.

Bila pasar lelang lebih maju lagi, pasar lelang *forward-* penyerahan kemudian seperti yang dikembangkan Bappebti di 18 provinsi itu, bisa memanfaatkan kredit perbankan. Karena pada konsep pasar lelang *forward*, penyerahan komoditi atau produk yang dimenangkan pembeli melalui lelang dan telah disepakati pada dokumen kontrak, ada *range* waktu bagi penjual untuk mempersiapkan atau pun berproduksi komoditi yang dibutuhkan pembeli.

Dengan kontrak pembelian inilah pihak penjual bisa mengajukan kredit kepada bank, yang dapat digunakan baik untuk produksi atau pun kebutuhan dana lainnya. Dan di dalam konsepnya, mekanisme perdagangan seperti itu dijamin oleh lembaga penjaminan.

Instrument perdagangan pasar lelang *forward* semacam ini sesungguhnya sudah diatur berdasarkan SK Memperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004, tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi.

Seperti yang telah dibahas pada Rubrik Wawasan, Edisi Januari 2009, tentang ekonomi kreatif, peraih Nobel tahun 1995, Robert Lucas, mengatakan, ekonomi kreatif adalah *kekuatan yang menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kota atau daerah dapat dilihat dari tingkat produktifitas klaster orang-orang bertalenta dan orang-orang kreatif yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya.*

'Nah, jelas sudah, pemerintah daerah harus bisa lebih kreatif mengangkat keunggulan komoditi yang dihasilkan. Sehingga mampu menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Jadi, kalau mau dipilih lagi oleh rakyat menjadi pejabat daerah, para pejabat harus kreatif mencari keunggulan daerahnya dan memasarkan komoditi unggulan tersebut melalui pasar lelang. ▲

*) Eddy SL Purba

Ramah dan bersahaja. Demikian yang terlintas melihat sosok pria kelahiran Prabumulih, Sumatera Selatan, 24 April 1956, ini. Belum lama ini, Edi Susmadi berhasil “mengalahkan” sejumlah pesaingnya untuk memperebutkan kursi Direktur Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Bahkan, alumnus Universitas Negeri Jakarta, jurusan Administrasi Niaga tahun 1986, ini, mengaku justru tidak memiliki ambisi apa pun saat terpilih menjadi salah satu calon untuk “berlaga” di arena *fit and proper test* pada pemilihan Direktur BBJ itu.

Tetapi pengalamannya sudah sarat di bidang perdagangan komoditi, akhirnya Edi Susmadi berlabuh menjadi direktur di BBJ. Dan jabatan itu resmi dipangkunya sejak 1 Januari 2009.

“Barangkali saya terpilih ini karena salah satu *strength* yang saya miliki. Saya cukup banyak mengetahui *network* perdagangan komoditi di pasar lokal dan internasional,” kata suami dari Euis Juaningsih.

Edi Susmadi

JAJAL BISNIS PERDAGANGAN BERJANGKA

Selama pengalaman kerja, saya lumayan mengetahui karakter-karakter pebisnis di bidang perdagangan berjangka komoditi, tambahna.

“Tetapi jujur, saya lemah di pasar keuangan- *foreign exchange*. Karena itu bukan bidang saya, jadi saya kurang begitu memahaminya,” ulas ayah dari Ira Delizia Estaliza (23), semester akhir Fak. Ekonomi Universitas Trisakti, Oscar Prima (17), siswa kelas 2 SMA Al-Azhar dan Zelica Zelda (11) siswi kelas 5 SD Al-Azhar.

Pria berpostur tinggi 167 cm dan berat 103 kg ini, memang memiliki latar belakang karir sebagai *physical commodity trader*. Dia memahami betul seluk beluk perdagangan komoditas, mulai dari membeli, mengumpulkan di gudang, sortasi, lalu dipilah-pilah untuk persiapan ekspor, hingga dikapalkan dan dimonitor di negara tujuan. Diantaranya, dia pernah menangani komoditas *coffee, cocoa, soya bean, rice, corn, sugar cane molasses, tapioca*, dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu, dia pun memiliki pengalaman untuk kegiatan impor. Bahkan komoditi pertambangan batu besi dan batubara di Kalimantan Selatan pernah digelutinya.

Menurutnya, perjalanan karir bisnisnya telah mengajarkan banyak hal pada dirinya. Mulai dari bersahabat dengan petani lokal hingga terbang berbisnis ke Amerika, Jerman, Inggris, Brazil, Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Eropa mengunjungi *network* dan klien nya.

Sejak kecil, putra pasangan H. Hambali (alm) dan Hj. Siti Aisyah (almh) ini, mengaku memang tidak pernah bercita-cita menjalani profesi yang sama dengan orang-orang di sekelilingnya. Termasuk menekuni profesi ayahnya yang merupakan seorang pegawai bagian Logistik di Pertamina. Padahal kedua kakak tertuanya diketahui mengikuti jejak sang ayah yang bekerja di perusahaan minyak kebanggaan masyarakat Indonesia itu.

Edi mengaku, sejak usia dini dia telah memiliki sejumlah impian dan pandangan yang jauh ke depan. Oleh karena itu sejak muda dia memiliki keinginan kuat mencari peluang untuk terjun ke bisnis global.

Prinsip hidupnya yang selalu ingin maju itu, membuatnya berani mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Dan prinsip hidupnya itulah yang mewarnai perjalanan kariernya.

Bertutur tentang masa mudanya, Edi Susmadi, termasuk anak yang cerdas tetapi cenderung nekad. Bagaimana tidak, dimana sejumlah orang berharap mendapatkan beasiswa, dia malah meninggalkan akademi pariwisata yang memberinya beasiswa itu.

Tahun 1978, dia malah ikut tes sekolah penerbangan di Curug. Ketika dinyatakan lulus, penggemar warna hijau ini, tidak merasa rugi meninggalkan pendidikannya yang telah ditempuh selama tiga tahun di akademi pariwisata itu dan pindah ke sekolah penerbangan bergengsi tersebut. Lulus ditahun 1980 dari Curug, dia pun didampuk sebagai Simulator Aircraft Instructor, selama 10 tahun.

Tetapi dasar Edi yang selalu tertantang, meski akan dipromosikan sebagai salah satu pejabat di dinas kelaikan udara, dia tetap tidak melupakan mimpinya untuk mengenal bisnis global. Tahun 1989, penyantap sayuran dan ikan ini meninggalkan dunia penerbangan demi bekerja di PT. Cargill Indonesia. Jabatan tertinggi yang dipegangnya di perusahaan Amerika itu, menjadi Branch Manager Coffee Division di Bandar Lampung. Lalu menjadi General Manager Cocoa Division (2001-2002) di Makassar. Awal kariernya di perusahaan yang berbasis perdagangan komoditi ini dimulai dari trainee, kemudian meningkat menjadi trader dan menjejak promosi sebagai manager pada tahun ketiga.

Tidak puas juga berkarir di perusahaan Amerika, itu, tahun 2003 akhirnya penyuka lagu-lagu *oldest* ini pun pindah ke PT Indonesia Samudra Persada. Pada perusahaan yang bergerak di bidang *cold storage* tersebut, penggemar renang ini menjadi Marketing Director di Bandar Lampung. Kemudian sempat pula menjadi Senior Operation Trading Manager di PT Agri Mulya Indonesia di Surabaya. Kemudian Senior Manager di PT Indonesia Mineral Resources, di Banjarmasin, bertanggung jawab dalam pengadaan batu besi (iron ores), dan terakhir menjabat Executive Director, Specialist Coffee Association of Indonesia (SCAI), disamping sebagai Coffee Program Coordinator dari Agribusiness Market and Support Activities (AMARTA) salah satu project di bawah kendali USAID, Jakarta.